

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan dalam sektor publik adalah proses tata kelola yang baik dengan menyertakan pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial politik, dan penggunaan sumber daya seperti alam, keuangan dan manusia. Menurut (Nizam et al., 2018), Sumber daya untuk kepentingan rakyat dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola yang baik berkaitan dengan reformasi di bidang birokrasi, penegakan hukum, manajemen keuangan, peningkatan kualitas layanan publik, perubahan pola pikir yang akan mewujudkan tata kelola yang produktif, efisien dan efektif (Nizam et al., 2018). Dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Pengelolaan ini perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang berkontribusi terciptanya kualitas laporan keuangan.

Menurut Armel, (2017), Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila disajikan oleh suatu entitas pelaporan yang memiliki empat karakteristik kualitatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mengandung unsur kelengkapan info

ketepatanwaktuan informasi, informasi yang andal atau dapat dipercaya serta dapat dibandingkan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan (Fransiska et al., 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan dianggap berkualitas jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, tidak memiliki definisi yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pengguna dan dapat diandalkan, hingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik adalah memenuhi karakteristik seperti relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan kemudahan pemahaman (Nurfauza & Rahayu, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi Pemerintahan dan keuangan daerah.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang diterapkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan yang merupakan kunci terkait karyawan untuk mencapai hasil yang relevan dengan strategi bisnis organisasi (Rahadi et al., 2021). Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan kapasitas tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu instansi pemerintah, maka akan menentukan kualitas dari SDM yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas persaingan dari instansi pemerintah itu sendiri. Menurut Armel, (2017), Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna

informasi laporan keuangan. Pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan, suatu organisasi harus mempunyai SDM yang kompeten, kemudian mempunyai pengetahuan tentang cara dan proses penyusunan laporan keuangan, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/workshop, serta mempunyai pengalaman pada bidang keuangan (Nurfauza & Rahayu, 2020).

Selain Sumber Daya Manusia, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Menurut Prastyaningtyas, (2019), Sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Jember menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Permatasari, (2021), menyatakan bahwa pertama, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kedua, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan kontribusi hampir 50% kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan, studi ini merekomendasikan pentingnya peningkatan kualitas SDM

terutama bidang keuangan dan penerapan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dimana terdapat perbedaan dari laporan keuangan yang telah dinilai oleh BPK. Pada tahun 2020 LKPD mendapatkan opini dari BPK yaitu Tidak Wajar (TW) karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar, yakni tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pada tahun 2021 LKPD mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Dalam Pengecualian (WDP) karena BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020. Pengeluaran itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang habis pakai (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Opini itu bisa wajar tanpa pengecualian, jika saja tidak ada persoalan persoalan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan serangkaian penelitian yang mencakup tentang bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
3. Untuk menguji pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan hasil yang diharapkan dan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan menambah pemahaman terkait Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Jember dalam pengelolaan laporan keuangannya.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan informasi terkait Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.